

DAMPAK URBANISASI TERHADAP PENYEDIAAN PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN

Arifah Anisyaturrobiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Ilmu Ekonomi,

Email: anisyatur24@gmail.com

Abstract

This article explains how the influence caused by urbanization on the development of urban areas. Various factors have also contributed to the rapid population growth of the city. The higher the growth, the higher the demand for housing. With the high number of population growth, there will be problems in urban areas, especially the city government, one of which is in the provision of settlements and housing for the community. Urban residents who are dominated from rural areas and generally have low incomes are less able to buy decent housing in urban areas, this results in these residents being forced to live in poor and slum settlements. Therefore, the government needs to make efforts to provide decent and affordable housing for economically disadvantaged people. This article uses a library research approach related to literature study by reading, reviewing, and collecting secondary data sources.

Keyword: *Urbanization, Settlement, City.*

Abstrak

Pada artikel ini meninjau bagaimana pengaruh yang disebabkan urbanisasi pada perkembangan Kawasan perkotaan. Berbagai faktor juga berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan penduduk kota. Semakin tinggi pertumbuhan maka semakin tinggi juga permintaan akan tempat tinggal. Dengan tingginya jumlah pertumbuhan penduduk maka akan terjadi permasalahan pada Kawasan perkotaan terutama pemerintah kota, salah satunya yaitu dalam penyediaan pemukiman dan perumahan bagi masyarakat. Penduduk urban yang di dominasi dari daerah pedesaan dan umumnya berpenghasilan rendah kurang mampu untuk membeli hunian yang layak di Kawasan perkotaan, hal tersebut mengakibatkan penduduk tersebut terpaksa tinggal di pemukiman yang kurang baik dan kumuh. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya guna menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi penduduk yang tidak mampu secara ekonomi, Artikel ini, menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang terkait dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, meninjau, dan menghimpun sumber data sekunder.

Kata Kunci: Urbanisasi, Pemukiman, Perkotaan.

PENDAHULUAN

Secara makro, pengertian urbanisasi memiliki banyak metode yang terkait mengenai proses perubahan yang terkait, mulai dari pembangunan ekonomi, pertumbuhan demografi, sosial, teknologi, politik, lingkungan dan budaya (Knox dan McCarthy, 2014). Sedangkan pengertian urbanisasi secara mikro dapat dipahami yaitu proses meningkatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan dengan disertainya meningkatnya pemfokusan dan aktivitas penduduk di wilayah perkotaan, yang menjadikan sebuah wilayah perkotaan padat dan

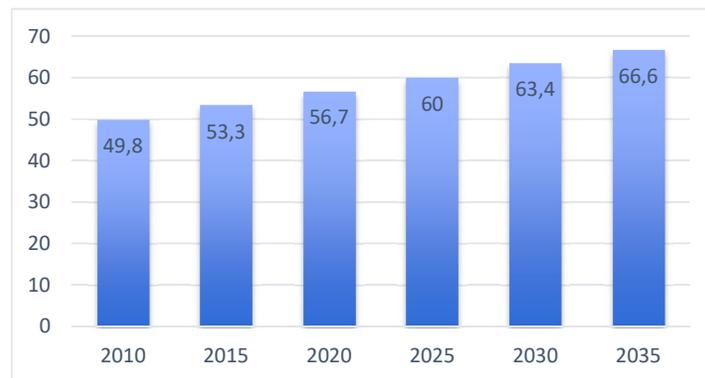
intensitas penduduk perkotaan lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya (Sato & Yamamoto, 2005).

Urbanisasi sendiri merupakan sebuah hal yang menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan dan para perencana setempat selama beberapa dasa warsa terakhir. Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, urbanisasi memiliki pengertian sebagai meningkatnya skala penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan (Wilson 1985: 225 dalam Noverina). Istilah urbanisasi secara umum dipahami sebagai pemfokusan penduduk Kawasan perkotaan yang dihitung sebagai persentase penduduk di suatu daerah, contohnya provinsi dan negara. Adapun faktor yang memengaruhi urbanisasi yakni pertumbuhan secara alami seperti kelahiran dan kematian penduduk di kota, berpindahnya penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan, dan yang terakhir berubahnya pengategorian wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah lain sekitarnya.

Urbanisasi juga disebabkan oleh ketidaksamannya pertumbuhan atau tidak meratanya fasilitas dari pembangunan, terutama perdesaan dan perkotaan. Dampaknya kawasan perkotaan menjadi daya pikat kaum pendatang dengan tujuan mencari pekerjaan. Maka dapat disimpulkan urbanisasi adalah suatu proses alamiah dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun jika pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menjadikan tren urbanisasi dapat menjadi dampak yang buruk bagi wilayah perkotaan itu sendiri. Menurut data hasil Sensus Penduduk 2020 pada bulan September tahun 2020 tercatat jumlah penduduk bertambah 32,56 juta jiwa dibanding sensus penduduk tahun 2010. Dengan luasnya daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 141 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahunnya maka akan berpotensi terjadi tren urbanisasi yang akan menyumbang kepadatan pada setiap kota-kota besar di Indonesia.

Tabel 1. Proyeksi Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Tahun 2010-2035



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan adanya proyeksi persentase penduduk wilayah perkotaan di Indonesia. Maka dapat diperkirakan, sebesar 56,7 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2020. Selanjutnya persentase diprediksi akan terus meningkat menjadi 66,6 persen pada tahun 2035. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan, maka dengan begitu akan mendorong berkembangnya beberapa kota besar. Dengan berkembangnya suatu kota dapat mendapat perhatian universal dari segi kebijakannya dan ilmu pengetahuan, karena pengaruhnya yang benar-benar berdampak pada lingkungan seperti pemakaian lahan yang sangat besar, langkahnya air bersih, polusi udara, munculnya diskriminasi sosial dan adanya sensibilitas. Permasalahan pada perkotaan juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seperti penyediaan sarana prasarana guna memenuhi kebutuhan paling dasar penduduk misalnya kebutuhan atas tempat tinggal bermukim, Pendidikan, air bersih, dan Kesehatan. Sarana prasarana lainnya lainnya yang bersifat sosial kemaasyarakatan, misal ruang terbuka guna berkumpul masyarakat. Selain itu sarana dan fasilitas olahraga juga harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dibidang sosial masyarakat di wilayah perkotaan. Adapun prioritas mengenai permasalahan pesatnya pertumbuhan penduduk kota selama ini yaitu usaha dalam menyediakan tempat tinggal serta memperbaiki kondisi kehidupan penduduk.

Adanya Pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan, maka dengan begitu akan mendorong berkembangnya beberapa kota besar. Dengan berkembangnya suatu kota dapat mendapat perhatian universal dari segi kebijakannya dan ilmu pengetahuan, karena pengaruhnya yang benar-benar berdampak pada lingkungan seperti pemakaian lahan yang sangat besar, langkahnya air bersih, polusi udara, munculnya diskriminasi sosial dan adanya sensibilitas. Permasalahan pada perkotaan juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seperti penyediaan sarana prasarana guna memenuhi kebutuhan paling dasar penduduk misalnya kebutuhan atas tempat tinggal bermukim, Pendidikan, air bersih, dan Kesehatan. Sarana prasarana lainnya lainnya yang bersifat sosial kemaasyarakatan, misal ruang terbuka guna berkumpul masyarakat. Selain itu sarana dan fasilitas olahraga juga harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dibidang sosial masyarakat di wilayah perkotaan. Adapun prioritas mengenai permasalahan pesatnya pertumbuhan penduduk kota selama ini yaitu usaha dalam menyediakan tempat tinggal serta memperbaiki kondisi kehidupan penduduk.

Dengan pemenuhan kebutuhan yang telah disebutkan adalah sebuah kewajiban yang harus ditanggung, tak hanya oleh pemerintah kota saja, namun juga dengan pihak swasta yang terlibat dalam memperoleh fasilitas dan infrastruktur dasar suatu kota. Misalnya pasokan

perumahan belum memenuhi permintaan akan rumah tinggal yang terus meningkat. Justru laju pengadaan perumahan mengarah ketertinggalan dari pertumbuhan penduduk wilayah perkotaan yang membutuhkan (Yudohusodo dan Salam, 1991). Isu yang terkait dengan pertumbuhan penduduk yang cepat akan cenderung terasa di wilayah kota – kota yang lebih kecil dengan penduduk kurang dari 100.000 jiwa. Memang secara umum pemenuhan kebutuhan perumahan, pengolahan sampah, air bersih dengan mekanisme perpipaan, dan pelayanan penunjang lainnya di daerah perkotaan jenis ini masih bisa dikatakan kurang.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut N. Daldjoeni (1988) Ada tujuh definisi urbanisasi, antara lain: pertama, peningkatan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di kawasan perkotaan, baik secara global, nasional, ataupun regional. Yang kedua, adanya migrasi penduduk dari desa ke kota. Ketiga, semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian non-pertanian di daerah pedesaan. Yang keempat, pertumbuhan perumahan menjadi perkotaan. Yang kelima, terjadi perluasan artifak struktur morfologi suatu kota ke daerah sekitarnya. Yang keenam, terjadi perluasan pengaruh kondisi ekonomi kota ke pedesaan, dan yang ketujuh, terjadi perluasan pengaruh suasana sosial, psikologis, dan budaya pedesaan, singkatnya, meluasnya nilai dan norma dari kota ke luar kawasannya.

Selanjutnya Menurut R. Bintarto yang dikutip oleh Andi Haris (2015) urbanisasi jika dilihat dari berbagai sudut, misalnya: Pertama, dari sisi demografi, urbanisasi dianggap suatu proses yang mengarah pada pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah. Artinya urbanisasi lebih berorientasi demografis yang berarti terjadinya ledakan penduduk baik yang terjadi di pedesaan ataupun perkotaan dianggap cenderung melebihi daya tampung dari wilayah tersebut. Selain itu, dampak pertumbuhan penduduk tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri terhadap permintaan akan perumahan. Yang kedua, dari segi ekonomi. Hal tersebut menjadikan urbanisasi dianggap menjadi proses dari perubahan struktural dalam bidang ekonomi, terciptanya perubahan mata pencaharian penduduk pedesaan dapat diamati, yakni dari sektor pertanian menjadi bekerja atau tidak bekerja di bidang pertanian atau menjadi pekerja di kota. Ketiga, menurut segi perilaku lebih menitikberatkan pada proses dimana manusia beradaptasi dengan situasi yang berubah, baik akibat perkembangan teknologi atau akibat yang disebabkan dari munculnya teknologi baru serta perkembangan dalam kehidupan. Keempat, dari segi sosiologis, hal ini menjadikan urbanisasi dikaitkan dengan perubahan cara hidup masyarakat desa di bawah pengaruh penduduk perkotaan. Dan yang terakhir dari sudut pandang geografi.

Urbanisasi dipandang sebagai proses perubahan serta pola yang terdistribusi dan meresap melintasi ruang dan waktu.

Meski begitu, dari sekian definisi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan istilah urbanisasi sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya penting untuk dipahami beberapa implikasi dari persoalan konseptual ini, yaitu urbanisme yang terkait: yang pertama dengan pertumbuhan populasi. Kedua, melalui proses urbanisasi, kota juga akan mengalami pertumbuhan ke arah peningkatan ukuran kota dan peningkatan fasilitas/utilitas yang diperlukan bagi masyarakat kota. Yang ketiga, karena ukuran fisik kota yang terus berkembang, hal ini berimplikasi pada perubahan gaya hidup dan sikap penduduk kota. Padahal, perubahan mentalitas penduduk kota juga dapat mempengaruhi cara hidup masyarakat pedesaan, terutama untuk penduduk yang sudah tinggal di Kawasan perkotaan.

Delik Hudalah (2005) menjelaskan bahwa permukiman merupakan kawasan yang terdiri dari banyak rumah-rumah dengan mempunyai fasilitas penunjang yang berkualitas bagi penghuninya, dengan begitu permukiman adalah kawasan yang digunakan sebagai pembangunan dari sejumlah rumah fungsional yang berkapasitas baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu menurut Andrian Sutedi, (2012) Permukiman merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi dalam rangka melakukan aktivitas seseorang. Banyak pengembang yang saat ini yang mementingkan kebutuhan atas permintaan konsumen, sehingga banyak pengembang yang menawarkan rumah dengan harga terjangkau atau dengan sistem pengangsuran tanpa pembayaran uang muka. Hunian atau tempat tinggal yang baik dan layak merupakan kebutuhan terpenting seluruh rakyat Indonesia, namun dalam kenyataannya pemerintah terkadang lupa bahwa masih banyak penduduk yang belum mempunyai hunian yang layak.

Dalam UU No. 1 tahun 2011 terkait Perumahan dan Pemukiman menjelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman ialah penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kelembagaan, sistem keuangan dan pendanaan, serta kontribusi masyarakat yang terkoordinasi dan dilaksanakan.

Dari penjelasan diatas dapat ditinjau bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi pembangunan, penyediaan pembangunan perumahan, penyediaan pembangunan perumahan, pemeliharaan perumahan dan habitat, dan perbaikan perumahan dan habitat, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan

habitat, penyediaan lahan dan penyelesaian, penyelesaian, pendanaan, dan kontribusi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengulas permasalahan perumahan dan pemukiman dalam konteks urbanisasi, terlebih lagi fenomena yang diakibatkan oleh bermigrasinya penduduk ke perkotaan yang awalnya dari wilayah perdesaan. Guna memberikan bayangan tentang urbanisasi di semua bagian di Indonesia. Mengulas penyebab dari meningkatnya skala penduduk perkotaan, selain itu juga membahas masalah yang terkait dengan migrasi dari perdesaan ke perkotaan. Pembahasan meliputi bagaimana pola, tren, dan factor utama pendorong urbanisasi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang terkait dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, meninjau, dan menghimpun sumber data sekunder berupa jurnal, dokumen, buku-buku atau literatur lain yang relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Data yang dipakai yaitu data sekunder yang dikumpulkan yang berasal dari publikasi BPS (Badan Pusat Statistik), dan artikel dan buku yang mengulas mengenai isu urbanisasi yang terkait permasalahan pemukiman dan perumahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor pendorong urbanisasi terjadi

Faktor utama urbanisasi terjadi yaitu faktor ekonomi. Factor ini berkontribusi penting pada terjadinya perpindahan penduduk dari suatu desa ke kota. Perpindahan ini dilakukan dengan pertimbangan materil dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi, dengan didasari oleh adanya faktor pendorong dari daerah asalnya yaitu perdesaan dan adanya faktor penarik di daerah perkotaan.

Faktor pendorong di balik urbanisasi penduduk pedesaan adalah kurangnya kesempatan kerja di daerah asal mereka. Pertanian merupakan sektor utama ketergantungan penduduk daerah perdesaan, sementara angka kelahiran di daerah perdesaan terus meningkat yang menyebabkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemiskinan di daerah perdesaan merupakan faktor pendorong penduduk perdesaan melakukan urbanisasi. Dari segi ekonomi, adanya urbanisasi dapat menumbuhkan produktivitas dan efisiensi alokasi sumber daya regional. Namun, urbanisasi juga dapat mengakibatkan beban fiskal tambahan bagi peningkatan infrastruktur (Widiawaty 2019).

Pembangunan infrastruktur adalah aspek fundamental untuk memacu proses pembangunan suatu negara guna mendorong laju perekonomian. Dengan adanya infrastruktur

seperti jalan raya, telekomunikasi, transportasi, angkutan umum dan fasilitas publik lainnya merupakan bagian penting yang harus mendapat perhatian khusus. Dari sisi infrastruktur, Indonesia cenderung belum memadai, dan harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan adanya perbaikan infrastruktur akan mendorong produktivitas, yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Savitri 2014).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pembangunan industri dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya perkembangan industri baru maka dapat mendorong terjadinya urbanisasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Kebijakan pembangunan yang “berorientasi pada perkotaan” merupakan salah satu pemicu terjadinya urbanisasi besar-besaran ke wilayah perkotaan. Padatnya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi yang hanya terjadi di wilayah tersebut dibanding daerah lain.

Faktor terjadinya urbanisasi juga dapat terjadi karena Fasilitas yang memadai dapat menjadi daya pikat masyarakat desa ke daerah perkotaan untuk melakukan perpindahan. Dengan adanya fasilitas Pendidikan yang baik di suatu daerah maka akan menimbulkan mobilitas penduduk guna mencapai Pendidikan yang diinginkan. Tujuan ini dapat membantu kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dengan akses mudah dalam memperoleh pendidikan yang baik, pendapatan yang layak dan mudahnya layanan Kesehatan (Widiawaty 2019).

Maka tujuan urbanisasi guna mencari pekerjaan di wilayah perkotaan terjadi bukan hanya oleh masyarakat yang telah berkeluarga saja, namun terjadi juga di antara penduduk seperti anak-anak usia sekolah maupun usia Pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena dengan tujuan mendapatkan pendidikan yang lebih baik di lingkungan perkotaan. Maka dengan begitu, masyarakat muda usia Pendidikan menengah yang pindah ke kota guna melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi merupakan sebuah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk pada perkotaan.

Dampak urbanisasi terhadap Penyediaan Perumahan dan Permukiman

Dampak yang disebabkan oleh urbanisasi dapat dipisahkan menjadi dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negative bagi Kawasan perkotaan. Sisi positif dari dampak urbanisasi yaitu dengan tingginya jumlah penduduk di Kawasan perkotaan maka menjadi pendukung perkembangan pembangunan ekonomi Kawasan perkotaan. Berbagai pusat ekonomi menjadi

berkembang di daerah perkotaan yang padat penduduk. Dari sisi negatif, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tak terkendali akan menyebabkan banyak permasalahan bagi Kawasan tersebut. Dalam situasi yang secara luas, pembangunan Kawasan perkotaan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, seperti pengurangan kapasitas guna menciptakan kehidupan bertempat tinggal yang nyaman dan sehat bagi penduduk perkotaan.

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berusia muda berpindah ke wilayah perkotaan dengan tujuan menempuh pendidikan akan menimbulkan banyak masalah kepada pemerintah kota sendiri. Selama menjalankan pendidikan, para penduduk dalam kategori ini memerlukan tempat tinggal yang setara dengan bagaimana karakter mereka, seperti tempat tinggal yang tidak jauh dengan pusat pendidikan. Tipe pemukiman atau hunian sementara ini tidak sama dengan tipe yang perlukan oleh penduduk yang berumah tangga biasanya.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan perpindahan penduduk perdesaan ke perkotaan, seperti penyediaan perumahan/pemukiman bagi banyak orang, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan dapat membawa manfaat dari segi ekonomi kepada pelakunya. Pelaku perpindahan ini percaya bahwa lebih mudah mencari pendapatan di wilayah perkotaan daripada di pedesaan, meski perlu melakukan dengan susah payah, misalnya hidup di pemukiman murah yang kurang layak. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat mengirimkan bagian pendapatannya yang didapat dari pekerjaan di kota dalam jumlah lebih besar kepada keluarga atau kerabat yang mereka tinggalkan di desa.

Dampak yang disebabkan oleh urbanisasi yaitu semakin kurangnya lahan kosong di perkotaan. Pertumbuhan penduduk kota yang begitu cepat sehingga sulit untuk mengimbangi daya dukung kota. Sekarang ini, minim adanya lahan kosong di kawasan perkotaan. Ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk lalu lintas kendaraan yang lancar, dan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin sedikit. lahan kosong perkotaan telah banyak digunakan oleh penduduk perkotaan sebagai lahan perumahan, perdagangan dan industri legal dan ilegal. Bangunan yang didirikan untuk penggunaan bidang perdagangan dan perindustrian biasanya dimiliki oleh masyarakat pendatang. Sementara itu, para penduduk urban yang tidak bertempat tinggal paling sering menggunakan lahan kosong untuk tempat tinggal para penghuni liar. Dengan demikian akan mengakibatkan kekurangan lahan kosong di wilayah perkotaan (Harahap 2013).

Terkait yang telah disebutkan diatas, salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan akibat adanya urbanisasi yaitu meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana pendukung seperti air bersih dan fasilitas perkotaan lainnya. Terkait hal ini memungkinkan pemerintah kota untuk menyediakan semua fasilitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal didalamnya.

Pemerintah seringkali melakukan hal tersebut dengan menghimbau partisipasi pihak lain, yaitu pihak swasta, dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat terjadi di perkotaan seringkali adalah penyebab dari perpindahan penduduk pedesaan ke perkotaan yang mengancam akan menyebabkan perluasan perumahan atau hunian kumuh di wilayah perkotaan. Permasalahan yang terjadi di kawasan pemukiman, khususnya yang masih berada di kawasan dengan kondisi lingkungan tidak sesuai, kualitas serta kelayakan infrastruktur, termasuk kelayakan Kinerja jalan, lingkungan sekitar, ketersediaan sistem sanitasi dan mekanisme drainase harus ditingkatkan.

Pemukiman yang tidak sesuai dengan kualitas hidup sehat dan tidak layak nya sistem drainase lingkungan akan menjadikan pemukiman menjadi daerah yang kumuh. Pengertian pemukiman kumuh adalah suatu kondisi kualitas lingkungan tempat tinggal yang amat sulit untuk ditinggali, disertai ciri-ciri antara lain yaitu kepadatan konstruksi yang sangat tinggi di wilayah yang terbatas, kerentanan terhadap penyakit, serta kualitas konstruksi yang sangat buruk, infrastruktur lingkungan yang tidak memadai dan terlayani yang membahayakan kelangsungan hidup dan penghidupan penduduk yang menghuni (Niken, 2014).

Karena perkembangan kawasan kumuh di Surabaya berhubungan dengan masalah padatnya perkotaan oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan kemiskinan. Dengan semakin banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan, maka semakin bertambah pula jumlah permukiman kumuh yang menjadi permasalahan pada lingkup perkotaan. Biasanya penduduk yang tinggal di kawasan kumuh perkotaan merupakan penduduk yang tertindas, yaitu mereka yang memiliki hak atas tanah, tempat tinggal, sarana prasarana dan layanan dasar, lapangan pekerjaan, pemberdayaan, partisipasi, serta rasa nyaman, aman dan keadilan yang terbatas.

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal tetap dan sanggup untuk membeli tempat tinggal baru, seperti di Kecamatan Sambikerep, Sukolilo, Rungkut, Bulak, Kenjeran dan lainnya adalah lokasi pemukiman baru yang berupa apartemen atau perumahan. namun bagi masyarakat bertempat tinggal tetap yang tidak mampu membayar, biasanya akan tinggal dengan keluarga atau kerabat, sehingga menjadi keluarga besar. Hal tersebut akan memberi dampak kepada lingkungan adalah daerah tersebut akan menjadi daerah yang padat penduduk (Yulia Indari, 2017).

Sementara itu, masyarakat yang tidak sanggup untuk bertempat tinggal yang layak seringkali mencari alternatif guna memenuhi kebutuhannya dengan menetap di daerah-daerah yang tidak sesuai dengan pembangunan non-perumahan, seperti bantaran pinggir sungai, di

bawah saluran bertegangan tinggi seperti Menara sutet, daerah pemukiman di dekat pasar tradisional, di sepanjang jalur kereta api, di sekitar tepi pantai, kolam dan tempat lainnya.

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Bagi Penduduk Perkotaan

Upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya melalui pembangunan rumah susun sederhana di beberapa wilayah Surabaya guna menunjang masyarakat yang tinggal di permukiman dengan kondisi kumuh serta liar, yang separuh diantaranya merupakan penduduk pindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Seperti rumah susun yang berada di daerah Keputih Surabaya. Rusunawa Keputih ini termasuk rumah susun yang baru saja dihuni pada akhir tahun 2018. Bangunan rumah susun ini terdapat empat blok dengan masing-masing blok terdapat 5 lantai. Rusunawa Keputih ini dibangun pemerintah kota untuk masyarakat yang terdampak pembangunan serta masyarakat yang tidak mampu bertempat tinggal tetap dengan layak. Sebelum dibangun sebuah rumah susun, daerah tersebut merupakan tempat pengelolaan sampah dan permukiman liar dan kumuh. Dengan akhirnya pemerintah Kota Surabaya melakukan penataan ruang maka sekitar daerah rusunawa tersebut juga dibangun ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman-taman yang dapat memberikan kesan hijau dan indah dari kondisi sebelumnya. (Wawancara dengan pengelola rusunawa keputih Kamis 26 Mei 2022).

Dengan adanya pembangunan rusunawa maka memberikan pengaruh yang baik bagi penduduk, penduduk yang tinggal di rusun khususnya merupakan penduduk yang tergolong berpenghasilan rendah. Hal tersebut memberi keuntungan dari sisi ekonomi dan memberikan solusi atas penduduk urban yang membuat Kawasan perkotaan semakin padat dengan tempat tinggal layak dan harga yang terjangkau bagi penduduk yang berpenghasilan rendah.

Kebijakan pembangunan rumah susun vertikal juga berpengaruh kepada pengembangan kualitas bagi lingkungan dan permukiman di kawasan perkotaan serta guna mengurangi kekumuhan di wilayah yang berpenduduk padat. Program tersebut diarahkan guna mengatasi masalah yang terjadi bagi penduduk berpenghasilan rendah supaya mendapat tempat tinggal yang layak huni. Namun tidak mengenai pembangunan saja, penjagaan kualitas dari sarana dan prasarana permukiman menjadi lingkungan yang lebih sehat, infrastruktur yang lebih baik dan tidak menjadi kumuh (Deasy Arieffiani, 2014)

KESIMPULAN

Meningkatnya penduduk perkotaan terjadi oleh beberapa faktor, yang pertama terjadi yaitu faktor ekonomi yang didasari oleh adanya faktor pendorong dari daerah asalnya yaitu pedesaan dan adanya faktor penarik di daerah perkotaan. Yang kedua, yaitu faktor pembangunan infrastruktur yang mendorong produktivitas, yang akan menunjang

pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pembangunan industri dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong terjadinya urbanisasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Keempat, terjadinya urbanisasi juga dapat terjadi karena Fasilitas yang memadai dapat menjadi daya pikat masyarakat desa ke daerah perkotaan untuk melakukan perpindahan seperti fasilitas Pendidikan.

Jika pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi tidak dapat dikendalikan, terutama karena arus migrasi yang besar ke kota-kota, maka pemerintah kota akan menghadapi banyak masalah mengenai jumlah penduduk yang tinggi. Salah satunya yaitu penyediaan pemukiman dan perumahan Kawasan perkotaan. Penyediaan pemukiman dan perumahan bagi sejumlah besar penduduk, maka pemerintah kota harus memfasilitasi penyediaan tempat tinggal untuk segala golongan penduduk. Bukan hanya bagi penduduk berpenghasilan tinggi yang sanggup memiliki tempat tinggal dengan harga yang tinggi, bahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah juga memiliki kebutuhan untuk mendapatkan rumah baik dan layak.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan yaitu dengan penyediaan tempat tinggal dengan harga terjangkau dan persyaratan yang bisa dipenuhi bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah. Seperti pembangunan rusunawa yang memberikan pengaruh yang baik bagi penduduk. Pemenuhan kebutuhan akan penyediaan perumahan melalui pembangunan perumahan memberi keuntungan dari sisi ekonomi dan memberikan solusi atas penduduk urban yang membuat Kawasan perkotaan semakin padat dengan tempat tinggal layak dan harga yang terjangkau bagi penduduk yang berpenghasilan rendah. Pembangunan tersebut perlu didampingi oleh perbaikan serta pemeliharaan agar tetap berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2012, *Hukum Rumah Susun Dan Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arieffiani, D. (2014). *Kebijakan pembangunan perumahan pemerintah kota surabaya dan konsistensi terhadap pemanfaatan lahan*. JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH), 7(1), 45-60.
- Badan Pusat Statistik, *Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035*,
<https://www.bps.go.id/publication/2013/10/07/053d25bed2e4d62aab3346ec/proyeksi-penduduk-indonesia-2010-2035.html>. Diakses tanggal 7 Oktober 2013.

Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Laju%20Pertumbuhan%20Penduduk%20per%20Tahun,yang%20sebesar%201%2C49%20persen>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Daldjoeni, N. (1998). *Geografi Kota dan desa*. Alumni.

Delik Hudalah. Pendekatan Pemberdayaan dalam Penanganan Daerah Permukiman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 16. No. 3, Desember 2005

Fitria, N., & Setiawan, R. (2014). *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat*. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C240-C244.

Harahap, F. R. (2013). *Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia*.

Haris, A. (2015). Studi Media dan Perpustakaan Tentang Urbanisasi. *Jupiter*, 14(1).

Knox, P.L. dan McCarthy, L.M. 2014. *Urbanization: An Introduction to Urban Geography*, Ed ke-3, Edinburg: Pearson Education Limited

Mardiansjah, Fadjar Hari, and Paramita Rahayu. "Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota-Kota di Indonesia: Suatu Perbandingan Antar-Wilayah Makro Indonesia." *Jurnal Pengembangan Kota* 7, no. 1 (2019): 91-110.

N. M. O. H. M. Savitri, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, pp. 61–98, 2014.

Noverina, M. (2017). *Fenomena urbanisasi dan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman di perkotaan Indonesia*. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 103-124.

Sato, Y dan Yamamoto, K. 2005. *Population concentration, urbanization and demographic transition*. *Journal of Urban Economics*. 58: 45-61. DOI: 10.1016/j.jue.2005.01.004

Widiawaty, M. A. (2019). *Faktor-faktor Urbanisasi di indonesia*.

Wilson, Christopher. 1985. *The Dictionary of Demography*. Paris: Roland Pressat.